

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manusia dilahirkan dengan beraneka ragam visualisasi dan karakteristik yang berbeda antar satu dengan lainnya. Dari segi visualisasi manusia memiliki beraneka ragam bentuk tubuh yang berbeda mulai dari kepala hingga jari kaki memiliki perbedaan dengan individu lain, seperti halnya bentuk hidung, bentuk telinga, bentuk rambut serta terdapat kondisi tubuh yang berbeda. Perbedaan kondisi tubuh dapat dikarenakan faktor kelahiran maupun karena pengalaman kecelakaan yang pernah menimpa individu disabilitas dalam hidupnya. Kecelakaan yang dialami tersebut dapat mengakibatkan hilangnya bagian tubuh ataupun hilangnya sensoritas indra yang dimiliki sehingga individu tersebut terlihat berbeda dengan individu normal lain. Kondisi individu yang berbeda dengan individu normal lain dapat dikategorikan sebagai penyandang disabilitas (Mulyati et al., 2019).

Berdasarkan World Report Disability yang dipublikasi oleh WHO (2011), disebutkan bahwa penyandang disabilitas telah diklasifikasikan ke dalam model biopsikososial, yang berarti penyandang disabilitas dilihat berdasarkan masalah kondisi kesehatan yang dialami, seperti kerusakan atau hilangnya salah satu bagian tubuh sehingga kondisi tersebut menghambat individu untuk melakukan aktivitas, dan menimbulkan masalah di kehidupan sosial mereka seperti sulitnya mengakses aspek

penting kehidupan yang seharusnya dapat dijangkau oleh seluruh masyarakat termasuk penyandang disabilitas. Kondisi yang dialami penyandang disabilitas tersebut membuat penyandang disabilitas tersisihkan dengan individu normal lainnya. dan individu tersebut perlu didukung dan dilindungi oleh negara dengan menggunakan perangkat administrasi publik.

Disebutkan oleh WHO bahwa di Asia Tenggara jumlah penyandang disabilitas mencapai 16% dari seluruh populasi dunia dan mereka mengalami kesulitan dalam menjangkau berbagai pelayanan sosial dasar seperti halnya pelayanan rehabilitasi dan akses pekerjaan (Sida, 2014). Kondisi yang dialami penyandang disabilitas tersebut menjadi sebuah ironi terhadap diskriminasi dalam masyarakat. Padahal penyandang disabilitas juga sama seperti individu pada umumnya yang memiliki kesamaan hak dasar yang perlu dilindungi.

Di lingkup internasional, penyandang disabilitas menjadi objek perlindungan utama oleh United Nations Convention on the Right Person with Disabillities (UN CRPD) yakni dalam menjamin hak-hak penyandang disabilitas secara intenasional yang bertujuan dalam memberikan kesamaan atas kesempatan, penghormatan, pemenuhan dan perlindungan atas hak penyandang disabilitas dalam kehidupan sosial (Puspito, Nugraheni dan Purnaweni, 2019). Adanya UN CRPD menghasilkan sebuah kesepakatan internasional mengenai hak penyandang disabilitas yang dicetuskan dalam Convention on the Right of Person with Disabilities (CRPD). Kesepakatan tersebut telah ditandatangani dan diratifikasi oleh banyak negara dunia, termasuk juga

Indonesia, dengan diwujudkan dalam UU No 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang berisi mengenai hak-hak mutlak yang harus didapatkan oleh Penyandang Disabilitas.

UU No 8 Tahun 2016 menjadi acuan nasional dalam menjamin hak-hak penyandang disabilitas. Acuan tersebut penting untuk menjamin hak penyandang disabilitas di Indonesia yang sejumlah 31.242.233 jiwa untuk yang berumur diatas 2 tahun (Susenas 2018, dalam Hastuti, dkk, 2019).

Tabel 1 Jumlah Penyandang Disabilitas Di Indonesia Tahun 2018

Jenis disabilitas	Jumlah penyandang disabilitas	Jumlah penduduk
Disabilitas anak (>2)	3.147.148	75.038.048
Disabilitas usia produktif (15-64 tahun)	19.788.682	177.882.094
Disabilitas lansia (> 65 tahun)	8.706.305	15.204.477
Total	31.242.233	254.303.480

Sumber: Susenas 2018, dalam Publikasi Smeru 2019

Berdasarkan data penyandang disabilitas yang dikutip dari Susenas di atas disebutkan bahwa penyandang disabilitas di Indonesia terbagi dalam 3 kategori usia yakni disabilitas anak sebanyak 3.147.148 atau sebanyak 4,19%, disabilitas usia produktif sebanyak 19.788.682 atau sebanyak 11.12%, dan disabilitas lansia sebanyak 8.706.305 atau sebanyak 57,26%.

Penyandang disabilitas usia produktif memiliki kesamaan dengan usia produktif non disabilitas, yaitu rentang usia dimana seseorang dapat melakukan peningkatan produksi dengan bekerja sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan

ekonomi (Anwar dan Fatmawati, 2018). Perbedaan antara usia produktif disabilitas dengan non disabilitas yaitu individu penyandang disabilitas mengalami diskriminasi sosial khususnya dalam mengakses pekerjaan dikarenakan penyandang disabilitas dianggap sebagai orang yang tidak sehat. (Purwandari, 2015), kemudian di Kota Semarang kuota minimal 1% penyandang disabilitas yang dipekerjakan di tiap perusahaan belum tercapai (Ratna dan Kismartini, 2018). Kondisi penyandang disabilitas terdiskriminasi dalam mengakses pekerjaan tersebut dapat mendorong penyandang disabilitas dalam kondisi tidak berdaya dan terpinggirkan sehingga dapat menimbulkan ketidaksejahteraan bagi penyandang disabilitas.

Aspek kesejahteraan bagi penyandang disabilitas telah diatur pada pasal 90 dalam UU No 8 tahun 2016 disebutkan bahwa dalam mewujudkan kesejahteraan penyandang disabilitas negara perlu menjamin kesejahteraan sosial penyandang disabilitas salah satunya yaitu dengan memberikan pemberdayaan sosial. Pemberdayaan Sosial menurut pasal 94 dalam UU No 8 tahun 2016 disebutkan bahwa pemerintah dalam melakukan upaya pemberdayaan sosial dilakukan dengan cara melakukan peningkatan kemampuan, penggalan potensi, penggalan nilai dasar, aksesibilitas, dan bantuan usaha.

Pemenuhan aspek kesejahteraan penyandang disabilitas dapat dilakukan dengan peningkatan kualitas diri penyandang disabilitas dengan dilakukannya pemberdayaan. Menurut Ife, pemberdayaan adalah proses pemberian daya kepada individu maupun kelompok yang kurang beruntung dengan tujuan agar mereka mampu

bersaing dengan individu maupun kelompok lain (Hadi, 2010). Pemberian daya tersebut juga berfungsi untuk membuat individu dapat memenuhi kebutuhannya sendiri dan memilih jalan hidupnya sendiri serta menjauhkan diri dari masalah sosial (Soeharto, 2005). Melihat definisi pemberdayaan tersebut maka pemberdayaan penting dilakukan khususnya kepada penyandang disabilitas yang dalam hidupnya mengalami kondisi tidak berdaya.

Pemberdayaan kepada penyandang disabilitas yang telah dilakukan sebelumnya memberikan dampak positif bagi penyandang disabilitas, seperti pada penelitian yang dilakukan oleh Sholehah (2017), disebutkan bahwa pelaksanaan pemberdayaan penyandang disabilitas di Kabupaten Bantul memberikan dampak positif yaitu dapat meningkatkan kemandirian dan kepercayaan penyandang disabilitas. Dampak pemberdayaan yang sama juga terlihat pada penelitian Dhairyaa dan Herawati (2019), yaitu berdampak positif bagi aspek sosial penyandang disabilitas seperti kepercayaan diri dan kemandirian meningkat. Adanya dampak positif yang dihasilkan dari pemberdayaan tersebut seharusnya pemberdayaan dilakukan dengan masif oleh tiap pemerintah daerah kabupaten maupun kota

Di Kota Tangerang Selatan juga tidak luput dari kelompok penyandang disabilitas. Berdasarkan data dari Dinas Sosial Kota Tangerang Selatan tercatat bahwa terdapat 476 orang penyandang disabilitas pada tahun 2020.

Tabel 2 Jumlah Penyandang disabilitas Di Kota Tangerang Selatan

Jenis disabilitas	Jumlah
Disabilitas fisik	124 orang
Disabilitas sensorik	223 orang
Disabilitas mental	21 orang
Disabilitas intelektual	69 orang
Disabilitas metal terlantar	39 orang
Total	476 orang

Sumber: Dinas Sosial Kota Tangerang Selatan, 2020

Data di atas menunjukkan bahwa terdapat penduduk Kota Tangerang Selatan yang termasuk kelompok penyandang disabilitas. Terdapat kelompok penyandang disabilitas di Kota Tangerang Selatan maka perlu memberikan pelayanan pemberdayaan sosial kepada penyandang disabilitas selain untuk melaksanakan amanat dari UU No 8 Tahun 2016 serta juga untuk meningkatkan keberdayaan mereka sehingga tidak terpuruk dalam kondisi yang tidak berdaya dan dapat memberikan kesejahteraan bagi mereka. Alasan tersebut juga didukung dengan didukung dengan melihat Kota Tangerang Selatan merupakan kota industri perdagangan dan jasa, sehingga dapat mempengaruhi kondisi masyarakat khususnya penyandang disabilitas yang berada di Kota Tangerang Selatan. Kondisi tersebut maka diperlukan pelaksanaan pemberdayaan penyandang disabilitas oleh pemerintah daerah Kota Tangerang Selatan.

Pada pelaksanaan pemberdayaan di berbagai kota lain memperlihatkan bahwa dalam pelaksanaan pemberdayaan masih mengalami hambatan sehingga tidak mencapai

tujuan pelaksanaan pemberdayaan, seperti halnya di Kabupaten Sidoarjo pelaksanaan pemberdayaan menemukan kendala dalam hal sinergi antara pemangku kepentingan yang terlibat dalam pemberdayaan (Andriyani&Setyowati, 2018). Di Provinsi Kalimantan Timur, pelaksanaan pemberdayaan penyandang disabilitas yang dilakukan tidak melibatkan penyandang disabilitas dalam perumusan kebijakan dan kurang mencapai kesejahteraan (Syobah, 2018). Pelaksanaan pemberdayaan disabilitas di Kabupaten Sumbawa Barat menemukan bahwa pemberdayaan yang dilakukan tidak menumbuhkan kemandirian karena hanya diberikan bantuan finansial (Yakin, Nurhidayati, Sujastiawan, 2020). Melihat temuan penelitian sebelumnya maka pelaksanaan pemberdayaan yang dilakukan masih mengalami hambatan dan kurang memberikan dampak kesejahteraan yang nyata bagi penyandang disabilitas.

Di Kota Tangerang Selatan pelaksanaan pemberdayaan penyandang disabilitas telah dilakukan oleh berbagai elemen masyarakat. pada proses pelaksanaan pemberdayaan yang dilakukan tersebut juga belum menghasilkan hasil pemberdayaan yang cukup baik, seperti pada penelitian yang dilakukan oleh Majid (2019), ditemukan bahwa pelaksanaan pemberdayaan masih mengalami kendala dalam aspek fisik, finansial, serta dukungan. Penelitian pemberdayaan juga dilakukan oleh Rachmawati (2020), menemukan bahwa pemberdayaan kurang berhasil karena kurang percaya diri dan ketidaksesuaian kemauan dan keterampilan penyandang disabilitas. Kedua penelitian tersebut maka dapat terlihat bahwa pemberdayaan penyandang disabilitas di Kota Tangerang Selatan juga masih kurang memberikan kesejahteraan kepada mereka.

Kegagalan mencapai tujuan pemberdayaan tersebut maka penulis melakukan analisis lebih dalam mengenai pemberdayaan penyandang disabilitas di Kota Tangerang Selatan, khususnya pemberdayaan penyandang disabilitas yang dilaksanakan oleh dinas sosial Kota Tangerang Selatan, mengingat Dinas sosial Kota Tangerang Selatan sesuai amanat UU No 8 Tahun 2016 pada pasal 90 memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan pemberdayaan sosial dengan tujuan untuk menjamin kesejahteraan kepada penyandang disabilitas, oleh karena itu peneliti mengambil pertanyaan penelitian **“Bagaimana Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Di Kota Tangerang Selatan?”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, masalah penelitian pelaksanaan pemberdayaan penyandang disabilitas di kota Tangerang Selatan dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pemberdayaan penyandang disabilitas di berbagai kota masih mengalami hambatan dan kurang memberikan dampak kesejahteraan.
2. pemberdayaan penyandang disabilitas di Kota Tangerang Selatan juga masih kurang memberikan kesejahteraan
3. Amanat kepada pemerintah daerah untuk menjamin kesejahteraan penyandang disabilitas yang tercantum pada UU No 8 Tahun 2016 pada pasal 90

1.3 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan program pemberdayaan penyandang disabilitas di Kota Tangerang Selatan?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan program pemberdayaan penyandang disabilitas di Kota Tangerang Selatan?

1.4 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pelaksanaan pemberdayaan penyandang disabilitas di Kota Tangerang Selatan.
2. Untuk menganalisis faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan pemberdayaan penyandang disabilitas di Kota Tangerang Selatan

1.5 Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan teoritis

Penelitian ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan penelitian ada dan diharapkan akan berkembang menghasilkan teori baru yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberdayaan penyandang disabilitas.

2. Kegunaan praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti dan dapat dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan mengenai masalah pelaksanaan pemberdayaan disabilitas.

1.6 Kerangka Pemikiran Teoritis

1.6.1 Penelitian Terdahulu

Tabel 3 Penelitian Terdahulu

Penulis	Tujuan	Hasil
I. Susilawati. (2016). Pemberdayaan Masyarakat Miskin Penyandang Disabilitas Melalui Pengembangan Industri Kreatif “Limbah Singkong” di Kabupaten Ponorogo.	Menganalisis pemberdayaan penyandang disabilitas dengan mengembangkan keunggulan daerah dan melihat tingkat kemandirian setelah dilakukan pemberdayaan	Pemberdayaan penyandang disabilitas yang dilakukan masih terhambat dalam hal komunikasi dengan pihak eksternal, ketidakmampuan menggunakan iptek, masyarakat masih berpikiran tradisional, masih timbul bergantung dan kurang percaya diri
I. Sholehah. (2017). Pemberdayaan Difabel Melalui Asset Based Approach Studi Kasus di Dusun Piring Desa Srihardono Kabupaten Bantul Oleh Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas (RTPD)	Mendeskripsikan pemberdayaan penyandang disabilitas dengan melihat potensi yang dimiliki penyandang disabilitas	Adanya pemberdayaan berdasarkan potensi yang dilakukan dapat menghasilkan dampak positif bagi penyandang disabilitas yang terlihat dari meningkatnya kemandirian kepercayaan diri, dan semangat hidup.
N. Syobah. (2018). Pemberdayaan Penyandang Disabilitas di Provinsi Kalimantan Timur.	Menganalisis tingkat keterlibatan penyandang disabilitas dalam perencanaan dan pelaksanaan program disabilitas dan mengukur dampak kesejahteraan yang dihasilkan	Pemberdayaan penyandang disabilitas yang dilakukan belum optimal karena tidak sesuai dengan masalah yang dihadapi penyandang disabilitas dan tidak menghasilkan lingkungan yang inklusif serta tidak menyalurkan potensi penyandang disabilitas ke penyedia kerja sehingga kesejahteraan penyandang disabilitas belum terwujud.
R. Andriyani, dan R. Setyowati. (2018). Pemberdayaan Penyandang Disabilitas dalam Memperoleh Hak pekerjaan yang Layak Melalui Pelatihan di	Melakukan analisis terhadap pemberdayaan yang dilakukan dan melihat faktor kendala yang terjadi dalam pelaksanaan pemberdayaan	Pelaksanaan pemberdayaan yang dilakukan mengalami tumpang tindih antar pemangku kepentingan dan pemberdayaan belum mencapai hasil yang diharapkan.

Yayasan Lumintu Kabupaten Sidoarjo.	.	
D. Waruwu, dan N. Adhi (2019). Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Pada Objek Wisata Kuta Bali.	Melakukan deskripsi atas keadaan penyandang disabilitas beserta keberdayaan mereka di lingkup pekerjaan yang berada di area rekreasi kuta	Penyandang disabilitas di area rekreasi kuta ditemukan terdapat penyandang disabilitas daksa dan disabilitas netra dan mereka kurang tersentuh pemberdayaan sehingga hanya mendapat pekerjaan yang kurang layak
A. Dhairyya, E. Herawati. (2019). Pemberdayaan Sosial dan Ekonomi pada Kelompok Penyandang Disabilitas Fisik di Kota Bandung.	Menganalisis pemberdayaan penyandang disabilitas di Kelompok Bina Bangkit (KBB)	Pemberdayaan yang dilakukan dapat memberikan hasil dari aspek sosial seperti kepercayaan diri dan meningkatkan keberdayaan, tetapi kurang memberikan dampak dalam aspek ekonomi penyandang disabilitas
Yakin, Nurhidayati, & Sujastiawan. (2019). Pelaksanaan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Oleh Dinas Sosial Kabupaten Sumbawa Barat (Berdasarkan Perda Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong)	Menganalisis proses pelaksanaan pemberdayaan disabilitas yang berlangsung di Kabupaten Sumbawa	Pemberdayaan penyandang disabilitas dilaksanakan dengan memberikan bantuan sosial., alat bantu kesehatan, dan peralatan mobilitas penyandang disabilitas, tetapi proses pelaksanaan tersebut masih belum menciptakan kemandirian penyandang disabilitas
M. Ptak. (2018). A Phenomenological Analysis of Disability And Empowerment	Menganalisis efek MRMM dan dampaknya terhadap kualitas hidup penyandang dsabilitas dengan cerebral palsy	Pemberdayaan disabilitas cerebral palsy dengan metode MRMM dapat meningkatkan kesadaran diri terhadap kondisi yang dialami, dapat melakukan tindakan fisik dengan lebih baik, dan dapat meningkatkan meningkatkan persepsi pengendalian diri dan memiliki dampak terhadap keutuhan dan mentalitas tubuh dirinya.

Morran, Gibbs, dan Mernin. (2017). <i>The Empowerment Model: Turning Barrier Into Possibilities</i>	Menganalisis hambatan berpartisipasi dan model pemberdayaan yang dilakukan untuk mengatasi hambatan penyandang disabilitas dalam berpartisipasi dalam proses pemberdayaan	Terdapat sejumlah hambatan dalam dalam partisipasi penyandang disabilitas, maka perlu dilakukan model pemberdayaan dengan memberdayakan peserta, instruktur, organisasi dan masyarakat dengan cara melakukan pemrograman, pemberian dukungan, dan menyiapkan strategi pelatihan untuk mengatasi hambatan yang dirasakan peserta penyandang disabilitas.
Cappelletti et al. (2020). <i>Epilepsy & Behavior Improvement of quality of life in adolescents with epilepsy after an empowerment and sailing experience</i>	Menganalisis pelaksanaan pemberdayaan kepada penyandang disabilitas dengan penyakit epilepsi dalam meningkatkan kualitas kehidupannya dan membandingkan dengan hasil persepsi pemberdayaan dari sisi pelaku pemberdayaan dan pihak keluarga.	Pemberdayaan yang dilakukan dapat meningkatkan pengaruh positif dalam hal kesehatan fisik dan fungsi emosional kelompok orang yang mengalami epilepsi dan pemberdayaan juga dapat mengurangi beban kelompok orang epilepsi dan meningkatkan kualitas kehidupan mereka

Pemberdayaan penyandang disabilitas di Kabupaten Ponorogo melalui potensi daerah yakni dengan pengembangan Industri Kreatif limbah singkong sebagai kegiatan pemberdayaan, menemukan hasil bahwa pemberdayaan penyandang disabilitas yang dilakukan telah sesuai dengan metode penelitian yang digunakan yaitu menggunakan metode *Community Based Research* (CBR), tetapi dalam pelaksanaan pemberdayaan masih mengalami kendala dalam hal komunikasi dengan pihak eksternal, ketidakmampuan menggunakan iptek, masyarakat masih berpikiran tradisional, masih timbul bergantung dan kurang percaya diri (Susilawati, 2016).

Pemberdayaan penyandang disabilitas di Dusun Piring yang dipraksarai oleh RTPD di Kabupaten Bantul dengan menggunakan pendekatan berbasis potensi. Adanya pemberdayaan berdasarkan potensi yang dilakukan dapat menghasilkan dampak positif bagi penyandang disabilitas yang terlihat dari meningkatnya kemandirian kepercayaan diri, dan semangat hidup (Sholehah, 2017).

Penelitian tentang pemberdayaan disabilitas juga dilakukan di Kalimantan Timur, dengan memfokuskan pada keterlibatan kelompok penyandang disabilitas dalam perencanaan dan pelaksanaan program pemberdayaan disabilitas serta menganalisis dampak pemberdayaan terhadap kesejahteraan sosial kelompok penyandang disabilitas. Dalam penelitian ini menghasilkan Pemberdayaan penyandang disabilitas yang dilakukan belum optimal karena tidak sesuai dengan masalah yang dihadapi penyandang disabilitas dan tidak menghasilkan lingkungan yang inklusif serta tidak menyalurkan potensi penyandang disabilitas ke penyedia kerja sehingga kesejahteraan penyandang disabilitas belum terwujud.(Syobah, 2018).

Penelitian Andriyani dan Setyowati, mengenai pemberdayaan penyandang di yayasan lumintu dengan melakukan pelatihan dalam rangka perolehan hal pekerjaan yang layak menghasilkan temuan bahwa pelaksanaan pemberdayaan yang dilakukan mengalami tumpang tindih antar pemangku kepentingan dan pemberdayaan belum mencapai hasil yang diharapkan. (Andriyani & Setyowati, 2018).

Di Bali pemberdayaan disabilitas juga telah dilakukan di area rekreasi Kuta Bali. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penyandang disabilitas di area rekreasi kuta

ditemukan terdapat penyandang disabilitas daksa dan disabilitas netra dan mereka kurang tersentuh pemberdayaan sehingga hanya mendapat pekerjaan yang kurang layak (Waruwu & Andhi, 2019).

Pemberdayaan penyandang disabilitas di Kota Bandung juga menghasilkan bahwa Pemberdayaan yang dilakukan dapat memberikan hasil dari aspek sosial seperti kepercayaan diri dan meningkatkan keberdayaan, tetapi kurang memberikan dampak dalam aspek ekonomi penyandang disabilitas (Dhairyya & Herawati, 2019).

Pemberdayaan penyandang disabilitas yang dilakukan di Kabupaten Sumbawa dilakukan dengan pemberian bantuan seperti jaminan sosial, alat pendengaran, fasilitas yang mendukung mobilitas dan kesehatan penyandang disabilitas. Hasil pemberdayaan yang dilakukan telah efektif karena telah didukung oleh komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi yang pelaksanaannya cukup baik, dan terdapat kendala dari pihak luar sebagai pihak yang menyalurkan bantuan sosial, tetapi disisi lain pemberdayaan yang dilakukan kurang dapat mendorong kemandirian penyandang disabilitas (Yakin et al., 2019)

Penelitian yang dilakukan Ptak, ia meneliti mengenai fenomena penyandang disabilitas cerebral palsy dengan melakukan pemberdayaan dengan metode MRMM (Metode Gerakan Martin ReWire). Ia memfokuskan pada efek yang didapatkan penyandang disabilitas setelah dilakukan metode pemberdayaan MRMM. Dalam penelitiannya menemukan bahwa pemberdayaan disabilitas cerebral palsy dengan metode MRMM dapat meningkatkan kesadaran diri terhadap kondisi yang dialami,

dapat melakukan tindakan fisik dengan lebih baik, dan dapat meningkatkan meningkatkan persepsi pengendalian diri dan memiliki dampak terhadap keutuhan dan mentalitas tubuh dirinya (Ptak, 2018).

Penelitian yang dilakukan Morran, Gibbs, dan Mernin, menemukan bahwa dalam melakukan pemberdayaan penyandang disabilitas terdapat sejumlah hambatan dalam dalam partisipasi penyandang disabilitas dalam proses pemberdayaan, untuk mengatasi hambatan tersebut dapat dilakukan model pemberdayaan dengan memberdayakan peserta, instruktur, organisasi dan masyarakat dengan cara melakukan pemrograman, pemberian dukungan, dan menyiapkan strategi pelatihan untuk mengatasi hambatan yang dirasakan peserta penyandang disabilitas (Morran, Gibbs, & Mernin, 2017).

Pemberdayaan telah dilakukan kepada kelompok orang yang mengalami epilepsi. Epilepsi merupakan salah satu jenis penyandang disabilitas. Pemberdayaan yang dilakukan kepada kelompok orang yang mengalami epilepsi menghasilkan pengaruh positif dalam hal kesehatan fisik dan fungsi emosional kelompok orang yang mengalami epilepsi dan pemberdayaan juga dapat mengurangi beban kelompok orang epilepsi dan meningkatkan kualitas kehidupan mereka (Cappelletti et al., 2020).

Penulis mengambil topik mengenai pelaksanaan pemberdayaan penyandang disabilitas didasari oleh kondisi penyandang disabilitas yang kurang memiliki keberdayaan untuk melakukan segala aktifitas hidupnya dan karena kondisi mereka dapat terjerumus dalam masalah sosial dan ketidaksejahteraan, serta upaya

pemberdayaan yang telah dilakukan kurang memberikan perubahan yang berarti bagi penyandang disabilitas itu sendiri. Oleh karena itu penulis melakukan analisis terhadap pelaksanaan program pemberdayaan yang dilakukan khususnya di Kota Tangerang Selatan.

Perbedaan penelitian ini dibandingkan dengan penelitian terdahulu yaitu, dalam penelitian ini memfokuskan pada proses implementasi program dari kegiatan pemberdayaan penyandang disabilitas dengan menggunakan teori Administrasi publik yang dikemukakan oleh David C. Korten yang memusatkan pemikirannya mengenai kesesuaian antara elemen keberhasilan implementasi. Pada penelitian ini akan menghasilkan analisis mengenai program pemberdayaan yang dilakukan serta melihat aspek kesesuaian program, pelaksanaan, dan hasil manfaat yang diterima oleh penyandang disabilitas. Sedangkan pada penelitian terdahulu lebih memfokuskan pada penggunaan teori pemberdayaan terhadap aspek pelaksanaan pemberdayaan dan hasil dari pemberdayaan.

1.6.2 Administrasi Publik

1.6.2.1 Pengertian Administrasi Publik

Pendapat Woodrow Wilson dan Leonard D. White yang dikutip dari buku Paradigma Administrasi Publik yang ditulis oleh Tjiptoherijanti dan Manurung (2017), disebutkan bahwa administrasi publik adalah suatu usaha melaksanakan segala hasil keputusan politik. Kemudian McCurdy, berpendapat bahwa administrasi publik adalah suatu proses politik yang diwujudkan dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan fungsi-fungsi negara (Keban, 2008). Menurut Corson dan Haris menyebutkan bahwa proses

politik dalam administrasi publik dapat dilaksanakan dengan cara menentukan keputusan, perencanaan perumusan tujuan, pencarian dukungan publik dan legislatif, pembentukan dan perbaikan organisasi, pengarahan dan pengawasan pegawai, memimpin pelaksanaan, melakukan komunikasi, menentukan metode dan prosedur, penilaian kinerja, mengontrol dan berbagai fungsi lain yang dilakukan oleh pemerintah (Tjiptoherijanto & Manurung, 2017).

Administrasi publik menurut Chandler dan Plano adalah usaha pengerahan sumberdaya yang ada untuk melaksanakan aktivitas pemerintahan dalam rangka untuk memecahkan masalah publik dengan cara melakukan perubahan lingkungan kerja pemerintah baik dari sisi manusia dan juga finansial (Keban, 2008). Banga berpendapat bahwa administrasi publik merupakan serangkaian aktifitas yang terdiri atas merumuskan, mengimplemetasi, dan mengevaluasi kebijaksanaan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan negara (Banga, 2018: 85).

Keban memandang administrasi publik sebagai kegiatan yang fokus pada tindakan pemerintah sebagai regulator dalam pengambilan keputusan, pemberian pelayanan, dan sebagai fasilitator dalam urusan strategis, hal itu dapat terjadi karena pemerintah dianggap lebih megerahui permasalahan yang ada dibandingkan oleh masyarakat dan pemerintah juga berupaya dalam peingkatan kemandirian masyarakat untuk menyuarakan dan pemerintah hanya memiliki fungsi sebagai penyedia (Keban, 2008).

Keseluruhan pendapat ahli di atas dapat disimpulkan bahwa Administrasi publik merupakan serangkaian proses pelaksanaan keputusan politik yang meliputi perumusan, pelaksanaan dan evaluasi dengan mengerahkan sumberdaya yang ada untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi masyarakat dalam rangka mencapai tujuan.

1.6.1.2 Ruang Lingkup Administrasi Publik

Ruang lingkup administrasi publik menurut Keban adalah (Keban, 2008: 10):

1. Manajemen faktor internal dan eksternal.
2. Pengaturan struktur organisasi agar kewenangan dan tanggung jawan sesuai kondisi tantuntutan lingkungan.
3. Respon terhadap kebutuhan, kepentingan dan aspirasi masyarakat dalam proses pembuatan keputusan.
4. Mengatur moral dan etika.
5. Pengendalian karakteristik lingkungan baik di dalam maupun di luar organisasi.
6. Akuntabilitas kinerja.

1.6.1.3 Paradigma Administrasi Publik

Administrasi publik memiliki lima paradigma yang mana terdapat tumpang tindih antar paradigma dalam hal fokus dan lokusnya. Robert T. Golembiewski, menyatakan administrasi publik memiliki lokus dan fokus. Lokus administrasi publik adalah birokrasi pemerintahan, tetapi dalam perkembangannya lokus dalam administrasi publik menjadi tidak jelas. Sedangkan fokus administrasi publik yaitu pada prinsip

administrasi, tetapi fokus ini berubah seiring dengan perubahan paradigma administrasi publik (Henry, 1975).

Paradigma 1: Dikotomi politik/administrasi (1900-1926)

Paradigma ini dipelopori oleh Frank J. Goodnow dan Leonard D. White, yang dalam di bukunya “politik dan administrasi” menyatakan bahwa terdapat dua perbedaan fungsi pemerintah. Pertama yaitu fungsi politik, yaitu tindakan yang dilakukan pemerintah melalui kebijakan yang dimiliki negara. Kedua yaitu fungsi administrasi, yaitu mencangkup pada peran eksekutif dalam menjalankan kebijakan. Telihat terdapat pemisahan kekuasaan dengan ditandai perbedaan fungsi kewenangan tersebut.

Paradigma ini terdapat pertentangan dalam hal lokusnya. Goodnow berpedapat administrasi memiliki lokus pada birokrasi pemerintahan, tetapi dalam konsep awal terdapat konsep politik yang lokusnya pada legitimasi kebijakan, hal ini menyebabkan terdapat dua dikotomi dalam lokusnya. Paradigma ini kemudian mendapat kritikan oleh Leonard D. White dalam bukunya “Introduction to the Study of Public Admnistration, dalam Dwight Waldo, menyatakan bahwa elemen politik tidak termasuk dalam administrasi, dan manajemen adalah studi utama dalam paradigma ini dan seharusnya administrasi publik memiliki bebas nilai dan tujuan utamanya dalam peningkatan ekonomi dan efektifitas.

Paradigma 2: Prinsip Administrasi (1927-1327)

Paradigma ini muncul diawali oleh W.F Willoughby dalam bukunya *Principles of Public Administration*, yang berisikan pendapatnya bahwa ada dorongan memasukan prinsip prinsip administrasi universal yang dapat membantu profesional dalam bekerja dengan menerapkan prinsip administrasi. Paradigmna ini fokusnya dalam penerapan prinsip administrasi dan tidak menjelaskan lokusnya dengan jelas, karena menganggap lokus administrasi dapat berada dimanapun.

Lebih jauh lagi administrasi publik tidak hanya berkontribusi dalam perumusan kebijakan tetapi juga dalam penerapan kebijakan tersebut oleh organisasi. Kemudian Luther H. Gulick dan Lyndall Urwick berpendapat bahwa prinsip adalah administrasi penting tetapi tidak semua prinsip tersebut diterapkan, sehingga terdapat tumpang tindih antara fokus dan lokus dan tidak ada batasan antara keduanya.

Padigma 3: publik administrasi sebagai ilmu politik

Paradigma ini menganggap administrasi tetap pada ilmu politik dan diperbaruhi lokusnya pada birkrasi pemerintah tetapi kehilangan fokusnya. Dikarenakan terdapat perbedaan pandangan dalam hal mekanisme budget dan tata cara penerapan dipelajari secara meyeluruh atau tidak. Atukan administrasi publik mempertimbangkan penggunaan filosofi administartif plato yang menadi dasat ilmu politik, ataukah admnistrasi publik memiliki ranah berbeda dalam penerapannya. Seperti yang diungkap Simn, administrasi lebih berfkus dalam pengambilan keputusan. adanya perbedaan ini membuat perlu dibangun kembali keterkaitan antara administrasi publik dengan ilmu politik.

Paradigma ini kemudian mendefinisikan kembali ranahnya, seperti dalam 1950 administrasi publik disebutkan terdapat tekanan dalam ranah kepentingan atau termasuk dalam persamaan dari ilmu politik. Pada akhirnya pada tahun 1962 administrasi publik tidak termasuk kedalam sub ranah ilmu politik. Di tahun 1964 administrasi publik kehilangan prestisnya dalam ilmu politik.

Paradigma 4: Administrasi publik sebagai ilmu administrasi (1956-1970)

Keith M. Henders, seorang administrasi publik, mengemukakan pendapatnya bahwa, teori organisasi telah atau seharusnya menjadi fokus dari administrasi publik. dan didukung oleh perkembangan pembangunan organisasi sebagai spesifikasi dari ilmu administrasi. Hal tersebut dikarenakan melibatkan psikologisosial yang mefokuskan pada penyelenggaraan organisasi dan aktualisasi manusianya.

Pada paradigma ini terdapat masalah dalam hal fokus administrasi publik, dapatkah disebut administrasi publik jika dalam ilmu administrasi tidak menggunakan prinsip advokasi secara meyeluruh, dan manjerial semua organisasi memiliki kesamaan dalam hal karakteristik, pola dan patolginya. Paradigma ini mengubah tekanan yang awalnya terdapat di ilmu politik menjadi sub ranah dalam ilmu administrasi. Kemudian terdapat dilematik perbedaan publik dan privat dan apa perbedaan dari kedua tipe diatas menjadi dilema yang sulit dalam berapa tahun belakangan, selain itu paradigma ilmu administrasi juga tidak dapat memahami nilai lebih dari kepentingan publik. Tidak masuknya kepentingan publik, maka administrsi dapat digunakan dalam segala tujuan, disisi lain nilai demokrasi merupakan tujuan ilmu administrasi.

Paradigma 5: administrasi publik sebagai ilmu administrasi publik

Pada paradigma sebelumnya administrasi publik belum memiliki fokus yang jelas tetapi sudah menampakan konsentrasinya pada teori organisasi, dengan mengacu pada pelaksanaan organisasi, perilaku manusia dalam mengelola organisasi, dan pembuatan pengambilan keputusan. Administrasi publik juga kurang menggambarkan lokus ilmunya, antara pelayanan publik atau pembuatan kebijakan. Pada administrasi tradisional lokus pada sektor publik dan sektor privat telah berkurang eksistensinya. Kemudian administrasi publik lebih memfokuskan pada ilmu politik, ilmu ekonomi dan proses pembuatan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan. Terdapat banyaknya fokus dan lokus menyebabkan perlunya pendefinisian kembali lokus dan fokus pada administrasi publik pada ilmu administrasi

Paradigma baru ini administrasi publik tetap mengacu pada prinsip administrasi dalam praktiknya dengan memerhatikan politik, nilai, teori normatif dan peran dalam kepentingan publik belum menjadi konsen utama di paradigma ini. Administrasi publik juga mendefinisikan kembali konsepnya dalam ilmu politik dengan menambahkan metodologi dan birokrasi dalam fokusnya. Lebih lanjut administrasi publik mencapai tingkat kepopuler dalam sistem pendidikan dengan didirikan studi pascasarjana dan doktoral dengan konsentrasinya pada kebijakan publik, pelayanan publik dan birokrasi publik. Dan administrasi akhirnya mendapatkan lokusnya pada spesialisasi pekerjaan dan organisasi

1.6.3 Kebijakan Publik

1.6.3.1 Pengertian Kebijakan Publik

Menurut Thomas R. Dye, kebijakan publik adalah semua kegiatan yang dilakukan negara untuk melaksanakan sesuatu atau tidak melaksanakan sesuatu yang dilakukan oleh pemerintah sebagai aktor dalam pengambilan keputusan (Herabudin, 2016: 21). Nugroho, menyatakan bahwa kebijakan publik adalah sebuah aturan yang berisi tentang pengaturan kepentingan bersama yang bersifat mengikat dan perlu ditaati oleh masyarakat (Herabudin, 2016: 39).

Menurut Peterson, sebagaimana dikutip Keban (2008), kebijakan publik merupakan aksi pemerintah dalam memecahkan masalah dengan memfokuskan pada siapa, kapan, dan bagaimana. Kebijakan juga menggunakan suatu sikap yang secara tetap dan berulang yang dihubungkan dalam pemecahan masalah publik melalui pemerintah (Abidin, 2012: 6). Menurut Edwards kebijakan publik merupakan proses pemecahan masalah yang dilakukan melalui tahapan penetapan masalah dan tahapan lanjut dengan menentukan input hingga menghasilkan output dan memberikan outcome bagi masyarakat (Imronah, 2011).

Keban (2008) menyatakan kebijakan publik dalam pelaksanaannya meliputi empat tahap, (1) tahap kebijakan, yaitu tahap perumusan pemecahan. (2) Analisis kebijakan, yaitu proses menganalisis kebijakan hingga mendapat alternatif terbaik. (3) Implementasi kebijakan, yaitu tahap realiasi atas apa yang telah diputuskan oleh legislatif dengan cara mengorganisir, menginterpretasikan, dan menerapkan kebijakan. (4) Monitoring dan evaluasi kebijakan, yaitu tahap yang dilakukan dengan tujuan

mengawasi proses implementasi dan melakukan pengamatan langsung dan menilai efisiensi dan efektifitas.

Kebijakan publik dapat disimpulkan sebagai suatu tindakan pemerintah sebagai pihak yang berwenang untuk memecahkan masalah publik dengan mengeluarkan kebijakan yang memperhatikan sasaran, cara yang dilakukan dan memperhatikan kapan harus melakukan tindakan serta kebijakan bersifat mengikat supaya dapat berdampak bagi masyarakat.

1.6.3.2 Pendekatan kebijakan Publik

Howlett dan Ramesh telah mengembangkan mengembangkan studi kebijakan publik dalam dua pendekatan yaitu (Herabudin, 2016):

1. Pendekatan deduktif, pendekatan ini digunakan sebagai postulat awal dalam melihat perkembangan fenomena yang terjadi. Pendekatan ini memiliki tiga sub tipe yaitu:
 - a. Public choice, sub tipe ini mengasumsikan bahwa harus dilakukan pembatasan campur tangan pemerintah dan memberi kebebasan individu untuk melakukan pilihan agar mendorong pertumbuhan pasar.
 - b. Teori kelas, sub tipe timbul untuk merespon tekanan kemampuan perekonomian berbeda dalam masyarakat yang mengakibatkan munculnya kelompok-kelompok ekonomi seperti kaum kapitalis dan pekerja.

- c. Neo institutionalism, sub tipe ini mengasumsikan bahwa tiap individu memiliki keterbatasan politik sehingga perlu adanya institusi birokrasi yang berfungsi sebagai penghubung dalam menyelesaikan persoalan regulasi dengan pemerintahan.

2. Pendekatan induktif

Pendekatan ini merupakan pendekatan yang menitikberatkan pada perumusan kebijakan melalui tingkat bawah (*bottom Up*). Pendekatan ini terdiri tiga dari sub tipe yaitu:

- a. Kesejahteraan ekonomi, sub tipe ini mengasumsikan bahwa negara merupakan pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya kegagalan pasar. Untuk mengatasi kegagalan pasar negara berperan dalam membatasi campur tangan pemerintah dalam hal transaksi ekonomi di samping itu negara tetap wajib menyediakan barang publik.
- b. Pluralisme dan kerjasama, sub tipe ini menekankan pada berbagai kelompok kepentingan yang jumlahnya banyak dan tersebar, maka seringkali terjadi tumpang tindih dan ketidaksetaraan antar kelompok kepentingan maka diperlukan kerjasama sebagai hasil kontestas antara pemerintah dan kelompok kepentingan.
- c. Statis, sub tipe ini mengasumsikan negara memiliki dominasi sebagai pemegang otoritas utama dalam menciptakan, mengorganisasikan dan mengatur masyarakat.

1.6.4 Implementasi Kebijakan

1.6.4.1 Pengertian Implementasi Kebijakan

Pressman dan Wildvsky menyebutkan implementasi adalah suatu kegiatan untuk menjalankan kebijakan, mewujudkan rencana kebijakan, menghasilkan kebijakan dan untuk menyelesaikan kebijakan untuk mewujudkan hasil yang sesuai dengan tujuan kebijakan (Purwanto & Sulistyastuti, 2012).

Edwards III mendefinisikan implementasi kebijakan adalah aktifitas pengerahan pelaksanaan kebijakan yang didalamnya terdapat kegiatan pengelolaan masukan (input) dan berusaha menghasilkan hasil (output) serta dampak (outcome) yang dirasakan masyarakat (Imronah, 2011). Van meter dan Van Horn menambahkan aktifitas pengarahan dilakukan oleh publik atau privat serta kelompok yang dikerahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Purwanto & Sulistyastuti, 2012).

Simon memandang implementasi merupakan pelaksanaan kebijakan dari pemerintah untuk mencapai tujuan (Khan, 2016). Cangkupannya melingkupi kemampuan organisasi pelaksana dalam mengkonsepkan kebijakan dan juga penerimaan kelompok sasaran terhadap kebijakan publik yang dilaksanakan (Tachjan, 2006). Implementasi berfungsi sebagai dasar pengambilan keputusan. Dalam melakukan implementasi seringkali menemukan hambatan dalam hal kurangnya dukungan politik ataupun kurangnya kapasitas organisasi pelaksana (Attia, 1999, Mthethwa, 2012 dalam Mugambwa et al., 2018).

Disimpulkan implementasi kebijakan adalah kegiatan pelaksanaan kebijakan melalui pengeralahan organisasi dan mengupayakan kelompok sasaran untuk menerima kebijakan yang diberikan dalam rangka mencapai tujuan yang diharapkan.

1.6.4.2 Model Implementasi Kebijakan

1. Model Implementasi Smith

Smith melihat dari sisi perubahan sosial dan politik dalam proses implementasi kebijakan. Implementasi kebijakan dilakukan untuk melakukan perubahan pola interaksi antar individu, kelompok dan institusi untuk menghasilkan perubahan gaya hidup masyarakat yang bersifat inkremental dan masyarakat disini merupakan elemen penting dalam melakukan implemetasi. Terdapat empat komponen yang saling mempengaruhi dan menimbulkan ketegangan berupa protes protes yang dapat menyebabkan penegakan lembaga baru ataupun mendorong perubahan dalam organisasi pelaksana (Tachjan, 2006). Keempat komponen tersebut yaitu:

1. Kebijakan yang diidealkan

Kebijakan yang diidealkan yaitu pola interaksi yang dilakukan pembuat kebijakan untuk mendorong terwujudnya perubahan perilaku masyarakat. ada empat kategori variabel kebijakan ideal yaitu, kebijakan formal, pernyataan keputusan formal, hukum, dan program pemerintah. Ada tiga jenis kategori kebijakan yaitu (1) Kebijakan sifatnya sederhana, (2) Kebijakan dapat organisasi atau non-organisasi (3) Kebijakan distributif, re-distributif, peraturan, mandiri peraturan, atau emotif-simbolik. Sedangkan untuk program

kebijakan dapat dilihat dari tiga aspek yaitu, (1) Intensitas dukungan, (2) Sumber kebijakan, (3) Lingkup program.

2. Kelompok Sasaran

Kelompok sasaran yaitu mereka yang mendapat pengaruh langsung oleh adanya kebijakan dan melaksanakan pola interaksi agar terwujudnya kebijakan sesuai dengan harapan pembuat kebijakan. kelompok sasaran dapat diukur melalui:

- a. Tingkat organisasi atau pelebagaan kelompok sasaran.
- b. Kepemimpinan kelompok sasaran.
- c. Pengalaman kebijakan sebelumnya dari kelompok sasaran.

3. Organisasi Pelaksana

Organisasi pelaksana merupakan organisasi yang memiliki tanggung jawab dalam melakukan pelaksanaan kebijakan. keberhasilan organisasi pelaksana dapat dilihat dari tiga aspek:

- a. Struktur dan personel, yaitu melihat stabilitas struktur dan kualifikasi dari personil organisasi pelaksana. Organisasi pelaksana yang tidak stabil dan personel yang kurang berkualitas akan berdampak pada kapasitas implementasi kebijakan.
- b. Kepemimpinan organisasi administrasi, yaitu melihat gaya kepemimpinan dan gaya sifat kepemimpinan yang dilakukan oleh organisasi pelaksana.

- c. Program dan kapasitas pelaksana, yaitu mengacu pada intensitas pelaksanaan program dan kapasitas organisasi pelaksana dalam mengatur dan mencapai tujuan program implementasi.

4. Faktor lingkungan

Faktor lingkungan adalah faktor-faktor yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi implementasi kebijakan seperti faktor budaya, sosial, politik, dan ekonomi yang ada dalam lingkungan kelompok sasaran.

2. Model Implementasi David Korten

Model implementasi David Korten mengeluarkan model kesesuaian implementasi kebijakan. Menurut Korten diperlukan sesesuaian antara program, organisasi pelaksana dan kelompok sasaran untuk mencapai keberhasilan implementasi kesesuaian ketiga unsur tersebut dapat dijabarkan seperti (Imronah, 2011) :

1. Program dengan kelompok sasaran, yaitu, program yang dilaksanakan harus sesuai dengan kebutuhan kelompok sasaran
2. Program dengan organisasi pelaksana, yaitu tugas yang tercantum dalam program harus sesuai dengan kemampuan pelaksana.
3. Kelompok sasaran dengan organisasi pelaksana, yaitu syarat untuk mencapai hasil program yang dilakukan organisasi pelaksana harus dapat dilaksanakan oleh kelompok sasaran

3. Model implementasi Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier

Menurut Mazmanian dan Sabatier terdapat tiga variabel yang dapat mempengaruhi pelaksanaan kebijakan. Variabel tersebut meliputi (Soebarsono, 2010:94):

- a. Karakteristik masalah, karakteristik masalah meliputi kesulitan teknis masalah, keragaman perilaku kelompok sasaran, presentase kelompok sasaran dibandingkan dengan jumlah populasi, dan ruang lingkup perubahan yang diinginkan.
- b. Karakteristik kebijakan, karakteristik kebijakan meliputi kejelasan dan konsistensi tujuan, teori kausal yang digunakan, ketepatan alokasi sumber daya, keterpaduan hierarki dalam dan di antara lembaga pelaksana, aturan-aturan keputusan dari badan pelaksana, rekrutmen pejabat pelaksana dan akses formal pihak luar.
- c. Variabel lingkungan, variabel lingkungan meliputi kondisi sosio-ekonomi dan teknologi, dukungan publik, sikap dan sumber-sumber yang dimiliki kelompok pemilih, dukungan dari pejabat atasan dan komitmen dan keterampilan pejabat pelaksana.

4. Model implementasi George C. Edwards

Edwards melihat implementasi kebijakan berdasarkan pendekatan masalah implementasi (Imronah, 2011). Menurutnya terdapat empat variabel utama dalam mencapai keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi (Indiahono, 2009). Komunikasi berguna sebagai sarana

penyampaian kebijakan dan program dari pelaksana kebijakan kepada kelompok sasaran sehingga dapat menghindari perbedaan pemahaman kebijakan ataupun program dan dapat mencapai keberhasilan implementasi. Selain itu diperlukan sumber daya untuk mencapai keberhasilan program, sumberdaya dapat mencakup sumberdaya manusia dari segi kualitas dan kuantitas, fasilitas, dan finansial yang cukup. keberhasilan implementasi juga didukung oleh disposisi yang dimiliki seorang implementor. Disposisi meliputi komitmen, kejujuran dan demokratis yang tinggi agar tercapainya implementasi kebijakan, serta juga diperlukan struktur birokrasi, seperti mekanisme dan struktur organisasi pelaksana agar mudah dipahami dan terhindar dari hal yang berbelit, panjang dan kompleks serta sigap dalam menghadapi tantangan perubahan dari luar organisasi.

5. Model implementasi Van Meter dan Van Horn

Menurut Van Meter dan Van Horn, implementasi kebijakan dipengaruhi oleh beberapa variabel seperti (Indiahono, 2009:38):

a. Standar dan sasaran kebijakan.

Variabel ini berarti suatu kebijakan haruslah memiliki kejelasan dan sasaran yang tepat agar menghindari dari kegagalan implementasi program.

b. Kinerja kebijakan.

Kinerja kebijakan berarti setiap kinerja perlu dilakukan penilaian untuk mengukur seberapa besar ketercapaian standar dan sasaran yang telah ditetapkan.

c. Sumberdaya.

Sumber daya disini meliputi sumber daya manusia dan sumber daya finansial yang menjadi penentu besaran dukungan sumber daya yang dimiliki untuk melaksanakan program atau kebijakan.

d. Komunikasi antar badan pelaksana.

Variabel ini dijadikan acuan dalam mencapai sasaran dan tujuan program karena memberikan fokus pada mekanisme dan prosedur yang dilakukan dalam melaksanakan implementasi.

e. Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik.

Variabel ini merupakan variabel yang kompleks karena antar variabel dapat saling mempengaruhi sehingga berdampak pada keberhasilan proses implementasi kebijakan.

f. Sikap pelaksana.

Variabel ini menunjukkan besaran tingkat demokratis seorang pelaksana dalam merespon kelompok sasaran dan lingkungan luar organisasi.

6. Model implementasi Merilee S. Grindle

Grindle berpendapat bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh dua variabel besar yaitu (Soebarsono, 2010:92) (1) Isi kebijakan (Content of policy), yang meliputi kepentingan kelompok sasaran termuat dalam isi kebijakan, manfaat yang diterima oleh target grup, derajat perubahan dari suatu kebijakan, ketepatan program, pelaku implementor dan sumber daya yang memadai. (2) Lingkungan kebijakan, yang

meliputi, Kekuasaan, kepentingan dan strategi yang dimiliki pelaksana kebijakan, karakteristik institusi dan rezim yang berkuasa, tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran.

Dwidjowijoto (2006) berpendapat bahwa implementasi kebijakan merupakan upaya mencapai tujuan kebijakan, dan implementasi kebijakan dapat berhasil jika tujuan akhir kebijakan dapat dicapai (Grindle, 1980 dalam Melina, Pratiwi & Hadi, 2013). Dalam pemberdayaan masyarakat dalam arti proses memiliki tujuan yaitu membuat masyarakat khususnya kelompok lemah supaya memiliki keberdayaan (Soeharto, 2005). pemberdayaan merupakan salah satu tujuan kebijakan, maka dari itu perlu dilakukan implementasi terhadap pemberdayaan supaya mengetahui tercapainya tujuan kebijakan tersebut.

1.6.5 Pemberdayaan Masyarakat

1.6.5.1 Pengertian Pemberdayaan

Menurut Ife (1995), pemberdayaan adalah proses pemberian daya kepada individu maupun kelompok yang kurang beruntung dengan melatih mereka menggunakan media, memajemen pelaksanaan hasil keputusan politik, memberi pemahaman sistem dan lainnya agar mereka mampu bersaing dengan individu maupun kelompok lain (Hadi, 2010). Pemberdayaan kepada kelompok lemah dilakukan supaya mereka dapat memenuhi kebutuhannya sendiri dan memiliki kebebasan dalam melakukan kegiatan sosial dan bebas dari masalah sosial (Soeharto, 2005). Daya yang diberikan dapat berupa aspek kognitif, konatif, psikomotorik atau hal lain baik berupa fisik maupun material (Widjajanti, 2011). Pemberian daya dimulai dari menciptakan

suasana yang dapat mengembangkan potensi masyarakat dengan cara memperkuat individu maupun struktur sosialnya (Karsasmita, 1996 dan Mulyawan, 2016), kemudian dibutuhkan partisipasi dari masyarakat dan dibutuhkan fasilitator sebagai pelaksana pemberdayaan (Widjajanti, 2011)

Ron Johnson dan David Redmod mendefinisikan pemberdayaan merupakan kegiatan melakukan penyeragaman dan mengembangkan berbagai kemampuan yang dimiliki untuk saling melengkapi dan kegiatan tersebut terjadi dengan sendirinya (Dwidjowijoto, Nugroho, Wrihatnolo, & R, 2007) . Pemberian pemberdayaan berguna bagi masyarakat agar dapat bertahan dan mengembangkan diri sehingga tingkat kemajuan dapat dicapai (Sobarna, 2003), meningkatkan kualitas diri dari keadaan tidak berdaya guna mengeluarkan diri dari jeratan kemiskinan dan ketertinggalan (Hatu, 2010), serta menciptakan kemandirian baik dalam hal berpikir, bertindak dan memegang kendali terhadap kegiatan yang dilakukan (Widjajanti, 2011)

Dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan adalah proses memberi kemampuan kepada kelompok lemah agar mereka menciptakan inisiatif dan menumbuhkan kemandirian dalam diri mereka agar dapat lebih produktif.

1.6.5.2 Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan kepada masyarakat tidak hanya sebagai subjek, tetapi juga mejadi objek pembangunan. Menurut Noor konsep pemberdayaan menggunakan tiga pendekatan yaitu, (1) targeted, yaitu pemberdayaan dilakukan dengan terarah dan sesuai dengan masalah yang dihadapi masyarakat, (2) empowering, yaitu,

pemberdayaan dilakukan oleh masyarakat sesuai dengan kemampuan yang dimiliki, (3) community, yaitu berusaha memberdayakan kelompok agar dapat memecahkan masalahnya sendiri. Noor juga berpendapat bahwa dalam melakukan pemberdayaan terdapat 4 aspek penting; (1) enabling, yaitu proses membangun kondisi yang dapat mendorong kemampuan masyarakat, (2) empowering, yaitu melakukan penyediaan input untuk memperkuat kemampuan yang dimiliki masyarakat, (3) protecting, yaitu melindungi kepentingan masyarakat lemah dengan cara meningkatkan partisipasi mereka dalam pengambilan keputusan. (Noor, 2011)

Sumodiningrat dan Gunawan (2002), masyarakat sebagai subjek pembangunan, pemberdayaan dilakukan dengan memperhatikan beberapa pendekatan seperti (1) pemberdayaan yang dilakukan harus berpihak pada sasaran masyarakat sebagai subjek pemberdayaan supaya masyarakat mampu menyelesaikan masalahnya secara mandiri sesuai potensi yang dimiliki, (2) menjadikan masyarakat untuk berpartisipasi dalam program pemberdayaan secara bersama agar dapat meningkatkan kualitas hidupnya, (3) penggunaan pendekatan kelompok dalam melakukan pemberdayaan, artinya pemberdayaan yang dilakukan secara berkelompok akan lebih efektif dalam memecahkan masalah yang dihadapi (Hadi, 2010).

Parson memandang pemberdayaan sebagai proses yang dijalankan secara berkelompok dan melihat proses pemberdayaan dari sisi pekerjaan sosial. Dari sisi pekerjaan sosial, pemberdayaan dapat dilakukan dengan menggunakan tiga pendekatan yaitu (1) pendekatan mikro, yaitu proses pemberdayaan yang difokuskan pada

pemberian tugas kepada individu yang dilaksanakan dengan bimbingan dan pelatihan agar dapat menjalankan kehidupannya sendiri, (2) pendekatan mezzo, yaitu pemberdayaan yang dilakukan secara berkelompok dengan memberikan pendidikan maupun pelatihan agar dapat meningkatkan kemampuan kelompok sasaran dalam menyelesaikan masalah yang dialami. (3) pendekatan makro, pada pendekatan ini masyarakat memiliki peran yang lebih luas, yakni tidak hanya sebagai objek pemberdayaan tetapi juga sebagai subjek pemberdayaan, sehingga masyarakat didorong untuk dapat dalam mengenali potensi yang dimiliki dan menentukan sendiri penyelesaian masalahnya (Hatu, 2010).

Bryant dan White (1987;22) melihat pemberdayaan sebagai pembangunan manusia dengan meliputi aspek: (1) kapasitas, yaitu proses meningkatkan kemampuan masyarakat dengan mendorong kapasitas masyarakat, (2) pemerataan, yaitu memerhatikan pemerataan dalam melakukan pemberdayaan agar tujuan memecahkan masalah masyarakat dapat tercapai, (3) pemberdayaan, yaitu proses memberi daya dan kewenangan kepada masyarakat, (4) sustainable, yang berarti dapat dilakukan secara berkelanjutan untuk mencapai peningkatan kapasitas pembangunan.

Konsep pemberdayaan menurut (Dwidjowijoto et al., 2007) dimaknai dengan makna yang berbeda oleh pelaksana kebijakan dan pemberdayaan masih dimaknai sebagai jargon atau stampel belum sampai pada penerapan konsep. Pemberdayaan cenderung dilihat sebagai konsep community development yang dapat dilihat dari tiga segi yaitu, (1) Pengalaman pelaksanaan pembangunan yang didasari oleh kebijakan,

yaitu melihat pengalaman pelaksanaan pada masa lampau dan memperbaikinya dengan kebijakan baru, (2) pertumbuhan yang dilaksanakan tidak memerhatikan kebutuhan masyarakat kelas bawah, yaitu pertumbuhan yang dipilih oleh pengambil keputusan berpandangan bahwa distribusi pembangunan akan tumbuh sejalan dengan konsep pertumbuhan ekonomi, sehingga pembangunan yang dilakukan kurang dirasakan oleh masyarakat kelas bawah, (3) kehidupan masyarakat didominasi oleh kemiskinan, pengangguran, rendahnya kualitas hidup dan keterbelakangan. Pandangan ini melihat konsep pertumbuhan tidak sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan kemudian dilakukan pemberdayaan yang memiliki nilai untuk menuntaskan permasalahan negara berkembang.

1.6.5.3 Tahapan Pemberdayaan

Dalam melakukan pemberdayaan dapat melalui tiga proses tahapan yaitu penyadaran, pengkapasitasan dan pendayaan (Dwidjowijoto et al., 2007).

1. Tahapan penyadaran.

Tahap ini adalah tahap dimana sasaran pemberdayaan diberikan pencerahan bahwa mereka memiliki hak untuk menyadari sesuatu yang mereka miliki seperti potensi dan kemampuan yang terdapat pada diri mereka sendiri dengan memberikan pengetahuan-pengetahuan yang sifatnya *kognisi*, *belief* dan *healing* agar dapat membangun keberdayaan dalam diri mereka.

2. Tahapan pengkapasitasan.

Tahapan ini merupakan tahap memampukan sasaran pemberdayaan, tahap ini dilakukan melalui tiga jenis yaitu mengkapasitaskan manusia, organisasi dan sistem nilai.

- a. Pengkapasitasan manusia, dilakukan dengan memberi pelatihan dan loka latih yang bertujuan untuk mengkapasitaskan sumber daya manusia supaya dapat menerima pemberdayaan yang diberikan.
- b. Pengkapasitasan organisasi, dilakukan dengan merestrukturisasikan organisasi yang akan diberi pemberdayaan.
- c. Pengkapasitasan sistem nilai, dilakukan dengan membantu sasaran dan membuat peraturan mengenai anggaran, sistem dan prosedur diantara mereka.

3. Tahapan pendayaan.

Tahapan ini merupakan tahap yang paling penting karena pada tahap ini berlangsung proses pemberian daya, kekuasaan, otoritas atau peluang dilakukan berdasarkan kemampuan dan kecakapan yang dimiliki.

Pemberdayaan pada penelitian ini dimaknai sebagai proses pemberian daya kepada penyandang disabilitas dengan memanfaatkan hambatan yang dimiliki supaya mereka dapat lebih berdayaguna dan dapat meningkatkan taraf hidupnya

1.6.6 Penyandang Disabilitas

1.1.6.1 Pengertian Penyandang Disabilitas

Menurut UU No 8 tahun 2016, Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Penyandang disabilitas didefinisikan berbeda sesuai model yang berkembang di masyarakat. Pada model biomedis yang dikemukakan oleh Bares didalam teoriya *Personal tragedy*, kecacatan dilihat sebagai kemalangan yang merupakan sanksi dari tuhan atas dosa yang diperbuat (Syafiie, 2014). Cacatan yang dimiliki dapat berdampak pada kesulitan melakukan aktifitas, krisis kepercayaan dan harga diri, serta terjadi hambatan dalam melakukan interaksi dengan lingkungan (Paramita, 2017)

Pada model medis, penyandang disabilitas dianggap sebagai sesuatu kerusakan fisik yang terjadi di bagian tubuh tertentu (Maftuhin, 2016). Kerusakan fisik yang dialami dapat mengganggu fungsi fisiologis sehingga menghambat seseorang dalam beraktifitas (Raj V, 2020). Pada model medis permasalahan yang terjadi dapat diatasi dengan pemberian obat oleh profesional.

Penyandang disabilitas pada model sosial didefinisikan sebagai hasil interaksi individu dengan lingkungan yang menghasilkan stigma penyandang disabilitas sebagai suatu ketidaknormalan yang dimiliki seseorang dan menimbulkan diskriminasi

terhadap ketidaknormalan tersebut (Maftuhin, 2016). Model sosial juga sebagai dasar dari pembentukan konsep ICF (*The International Classification of Functioning, Disability and Health*) yang dikeluarkan oleh WHO, yaitu penyandang disabilitas sebagai orang yang memiliki keterbatasan dari adanya kerusakan tubuh, memiliki hambatan dalam menjalankan aktifitas dan mengalami keterbatasan melakukan partisipasi dalam kegiatan sosial (Syafii, 2014). Hambatan sosial juga meliputi hambatan dalam hal ketersediaan kebijakan, stigma negatif, pelayanan yang memadai, pemberian pelayanan, dukungan dana, aksesibilitas, partisipasi dan ketersediaan data penyandang disabilitas (Santoso & Apsari, 2017).

Pada paradigma psikososial, penyandang disabilitas didefinisikan sebagai hambatan budaya yang dirasakan arena faktor ketidaklengkapan fisik yang dialami seseorang sehingga menghambat partisipasi dan kesetaraan penyandang disabilitas (Syafie, 2014).

Penyandang disabilitas dalam melaksanakan aktivitas kehidupannya dapat menemui berbagai hambatan (Santoso, 2017):

- a. Kurang adanya kebijakan yang memadai, kebijakan yang menyangkut disabilitas masih minim dan kurang memerhatikan kebutuhan penyandang disabilitas.
- b. Prasangka negatif, adanya prasangka negatif membuat penyandang disabilitas kurang dapat mengakses haknya pada bidang kehidupan yang ada.

- c. Terbatasnya penyediaan pelayanan, penyandang disabilitas masih mengalami kekurangan dalam akses pelayanan yang membuat diri mereka kembali bebas masih mengalami kekurangan dalam akses pelayanan khususnya pada pelayanan kesehatan dan rehabilitasi.
- d. Masalah pemberian layanan, pemberian layanan kepada penyandang disabilitas masih kurang optimal dikarenakan masih terbatasnya kemampuan pelaksana, kurangnya koordinasi dan lainnya.
- e. Kurangnya dana, adanya keterbatasan dana dalam mendukung pelaksanaan kebijakan yang menyangkut penyandang disabilitas.
- f. Kurangnya aksesibilitas, aksesibilitas seperti bangunan dan fasilitas publik yang ada kurang dapat mendukung keberadaan penyandang disabilitas.
- g. Kurangnya partisipasi, penyandang disabilitas masih kurang dapat berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat dan kurang dilibatkan dalam pengambilan keputusan.
- h. Kurangnya data, penyandang disabilitas masih kurang dalam hal pendataan.

1.1.6.2 Jenis Penyandang Disabilitas

Menurut UU No 8 Tahun 2016, penyandang disabilitas di klasifikasikan menjadi empat jenis yaitu:

- 1. penyandang disabilitas fisik, adalah ketidaklengkapan anggota tubuh yang berasal dari bawaan lahir, kemalangan ataupun karena penyakit tertentu yang menyebabkan hilangnya anggota tubuh sehingga mengalami keterbatasan

dalam menggunakan fungsi tubuhnya. Misalnya seperti cerebral palsy, kusta, amputasi anggota tubuh, cacat tulang, lumpuh, dan stroke

2. penyandang disabilitas intelektual, adalah seseorang yang memiliki gangguan fungsi pikir di bawah rata rata, misalnya tuna grahita, down syndrom dandisabilitas grahita
3. penyandang disabilitas mental, taitu seseorang dengan gangguan fungsi pikir, emosi serta perilaku yang seperti psikososial yaitu terdiri dari skizoforenia, bipolar depresi, anxiety, dan gangguan kepribadian, dan ada juga disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial seperti diantaranya atis dan hiperaktif
4. penyandang disabilitas sensorik, adalah seseorang dengan terganggunya fungsi panca indra seperti netra, rungu, dan wicara

Selain keempat itu terdapat pula disabilitas ganda, yaitu orang yang memiliki dua atau lebih kombinasi disabilitas,

1.6.6.3 Paradigma Pelayanan Sosial Dalam Pemberdayaan Penyandang Disabilitas

Menurut Dewi (2017) yang dikutip oleh (Santoso & Apsari, 2017), Pelayanan sosial dalam pemberdayaan kepada penyandang disabilitas dapat dilakukan dengan, pertama, model tradisional yaitu pemberdayaan dilakukan dengan pemberian amal yang bersifat sukarela. Kemudian paradigma pemberian pelayanan pemberdayaan berpindah menjadi model pelayanan yang bersifat individual dengan berbasis medis,

pada model ini pelayanan sosial pemberdayaan dilakukan dalam bentuk pelaksanaan rehabilitasi. Model medis tersebut dianggap hanya mampu menghilangkan hambatan individu penyandang disabilitas tetapi masih ada hambatan yang lebih besar dalam masyarakat yang tidak dapat diatasi dengan model ini (Maftuhin, 2016), sehingga dikembangkan lagi model sosial, yaitu pelayanan pemberdayaan yang berfokus pada perubahan sosial masyarakat. selanjutnya yaitu model pembangunan inklusif dengan menciptakan kehidupan masyarakat yang inklusif. Model ini ada agar penyandang disabilitas dapat lebih merasakan hak hak yang seharusnya didapatkan di dalam kehidupan sosial.

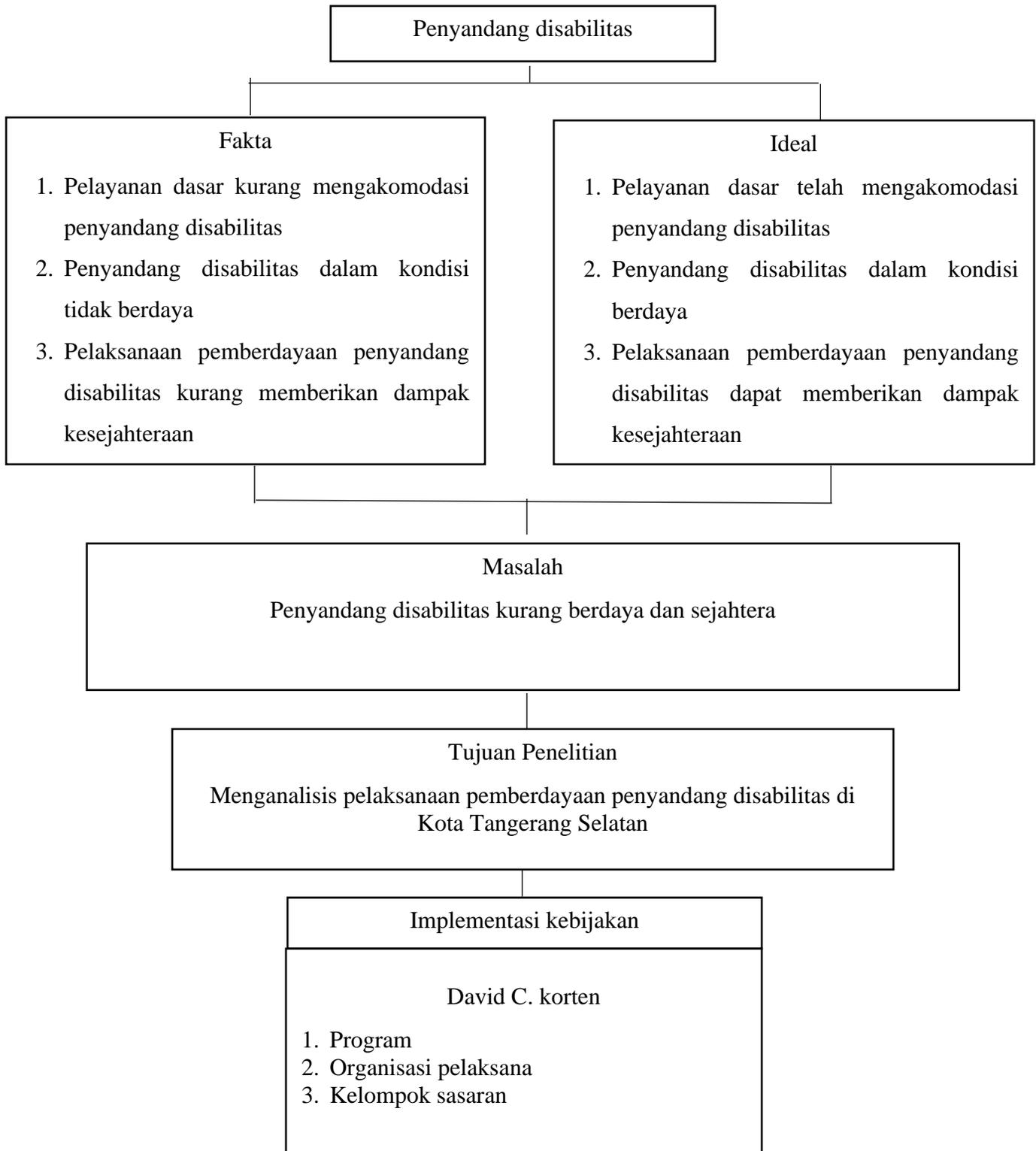
Terdapat beberapa pendekatan dalam pemberian pelayanan pemberdayaan kepada penyandang disabilitas, pertama yaitu pendekatan *institutional based*, yaitu pelayanan pemberdayaan dilakukan melalui institusi institusi dengan menggerakkan keaktifan program rehabilitasi yang didukung oleh tenaga profesional sebagai pelaku pemberi pelayanan pemberdayaan kepada penyandang disabilitas. Kedua, yaitu pendekatan *community oriented*, yaitu pemberian pelayanan pemberdayaan dilakukan tidak dalam suatu institusi, tetapi dilakukan dengan memberikan pelayanan pemberdayaan dengan datang langsung ke masyarakat dengan menerapkan program program pemberdayaan yang ditujukan kepada penyandang disabilitas. Ketiga, pendekatan *community based*, yaitu pemberian pelayanan pemberdayaan yang dilakukan dengan memfasilitasi pemberdayaan dengan melihat masalah yang ada, kapasitas penyandang disabilitas, dan potensi yang dimiliki untuk melakukan

pelaksanaan pemberian pelayanan pemberdayaan. Keempat, pendekatan *community managed*, yaitu pelayanan pemberdayaan yang dilakukan dengan memfasilitasi dalam hal pemberian pelatihan dan pendampingan serta menyerahkan kendali kepada penyandang disabilitas sebagai subjek pemberdayaan, sehingga mereka dapat menentukan kebutuhan dan keinginannya supaya dapat menyelesaikan masalahnya sendiri (Santoso & Apsari, 2017)

Pemberdayaan program penyandang disabilitas melalui program pembinaan pembinaan penyandang cacat dan eks trauma dalam penelitian ini dimaknai sebagai pemberdayaan penyandang disabilitas dengan pendekatan *community based*, yaitu dengan memfasilitasi pemberdayaan penyandang disabilitas dengan berbasis pada hambatan yang dimiliki dengan pelaksanaan berbagai pelatihan kepada penyandang disabilitas.

1.6.7 Kerangka Pikir Penelitian

Gambar 1 Kerangka pikir penelitian



1.7 Operasionalisasi Konsep

Penyandang disabilitas adalah orang yang memiliki keterbatasan disebabkan karena kerusakan kondisi tubuh sehingga mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, maupun sensorik, kondisi tersebut dapat menghambat individu dalam menjalankan aktifitas dan mengalami keterbatasan melakukan partisipasi dalam kegiatan sosial. Berbagai keterbatasan mendorong diadakannya pemberdayaan sosial yang ditujukan kepada penyandang disabilitas sebagai subjek pembangunan.

Pemberdayaan adalah proses memberi kemampuan kepada kelompok lemah agar mereka menciptakan inisiatif, menumbuhkan kemandirian, dan mengurangi ketergantungan dalam, lebih produktif dan mampu bersaing dengan individu lain sehingga dapat menjauhkan diri dari terjerumus dalam masalah sosial. Dari definisi pemberdayaan tersebut maka penyandang disabilitas perlu dilakukan pemberdayaan agar dapat meningkatkan keberdayaan, kemandirian dan bersaing dengan individu lainnya.

Penelitian ini menganalisis mengenai pelaksanaan pemberdayaan penyandang disabilitas yang dilakukan di Kota Tangerang Selatan dengan melihat dimensi kesesuaian program, pelaksanaan, dan hasil manfaat yang diterima oleh penyandang disabilitas. Pada penelitian ini menggunakan teori keberhasilan implementasi yang dikemukakan oleh David Korten, dengan melihat kesesuaian antara variabel program, organisasi pelaksana, dan pemanfaat. Variabel tersebut digunakan dengan maksud untuk menganalisis gejala fenomena pemberdayaan penyandang disabilitas di Kota

Tangerang Selatan yang memfokuskan pada perencanaan, pelaksanaan, dan kesesuaian manfaat yang diterima oleh penyandang disabilitas sebagai sasaran program. Oleh karena itu operasionalisasi konsep yang dirumuskan sebagai berikut:

Tabel 1.7 Operasionalisasi Konsep

No	Fenomena	Sub fenomena	Dimensi	Gejala	Narasumber
	Pelaksanaan Program Pemberdayaan Penyandang Disabilitas	Perencanaan program pemberdayaan	1.Program	a.Kejelasan tujuan b.Adanya kebijakan c.Anggaran yang diperlukan d.Strategi yang digunakan	a.Pemerintah dan kelompok penyandang disabilitas b.Pemerintah c.Pemerintah dan kelompok penyandang disabilitas
		Pelaksanaan program pemberdayaan	2.Organisasi pelaksana	a.Pemahaman dan pengetahuan pelaksana b.Respon terhadap tuntutan program	a.Pemerintah b.Pemerintah
		Kesesuaian manfaat yang diterima	3.Pemanfaat	a.Ketepatan program b.Ketepatan pelaksanaan c.Ketepatan tujuan d.Ketepatan lingkungan	a.Kelompok penyandang disabilitas b.Kelompok penyandang disabilitas c.Kelompok penyandang disabilitas c.Kelompok penyandang disabilitas

1.8 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan penyelenggaraan penelitian berdasarkan kaidah ilmiah melalui serangkaian hukum, aturan dan tata cara tertentu dan dapat dipertanggungjawabkan (Herdiansyah, 2011:3).

1.8.1 Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, Penelitian kualitatif menurut Denzin dan Lincoln adalah penelitian yang melihat peristiwa yang terjadi dalam suatu kelompok dan pengaruhnya terhadap lingkungan serta perilaku subjek, sedangkan menurut Creswell, penelitian kualitatif adalah pemahaman terhadap masalah yang ada secara menyeluruh dan melakukan analisis makna yang dilakukan secara natural dan tidak terjadi pengaruh dari peneliti (Herdiansyah, 2011:7-8). Penelitian kualitatif dipilih karena penelitian ini dimaksudkan untuk melihat fenomena yang terjadi dengan mengamati objek penelitian kemudian dianalisis hubungan-hubungan yang terjadi didalamnya dapat mempengaruhi subjek yang diteliti.

Penelitian ini menggunakan fenomenologi sebagai pendekatannya. Fenomenologi merupakan pendekatan penelitian yang memfokuskan pada pengalaman subjektif, yakni peristiwa yang berkaitan dengan individu dalam kondisi tertentu terhadap perilaku yang dilakukan oleh seseorang (Moleong, 2011). Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi karena peneliti menginginkan hasil penelitian yang berfokus pada pengalaman individu disabilitas dalam memandang konsep

pemberdayaan yang tersedia dan berpartisipasi pada pelaksanaan pemberdayaan penyandang disabilitas di Kota Tangerang Selatan.

1.8.2 Situs Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi penelitian di Dinas Sosial Kota Tangerang Selatan sebagai lokasi utama pemberdayaan penyandang disabilitas. Pada penelitian ini juga menggunakan rentang waktu objek penelitian yang dilakukan pada tahun 2019-2020.

1.8.3 Subjek Penelitian

Dalam memperoleh informasi mengenai pelaksanaan pemberdayaan disabilitas di Kota Tangerang Selatan, peneliti menentukan subjek penelitian yang dipilih secara purposive. Dengan subjek yang diteliti adalah pihak-pihak yang dapat memberikan informasi terkait topik penelitian. Maka dari itu yang dijadikan subjek penelitian adalah Kepala Bidang Rehabilitasi Dinas Sosial Kota Tangerang Selatan sebagai pihak yang membawahi langsung program pemberdayaan disabilitas, dan ketua kelompok maupun yayasan penyandang disabilitas yang terlibat dalam pelaksanaan program pemberdayaan penyandang disabilitas

1.8.4 Jenis Data

Dalam penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif, yaitu jenis data yang disajikan dalam bentuk kata-kata. Data kualitatif bertujuan untuk mendeskripsikan penjelasan mengenai keadaan yang terjadi dengan memahami kronologis peristiwa dan memberi penilaian sebab akibat yang akan terjadi (Satori & Komariah, 2014: 200) .

Yang termasuk dalam data kualitatif dalam penelitian ini adalah gambaran umum mengenai objek penelitian seperti pelaksanaan pemberdayaan, keadaan penyandang disabilitas yang mengikuti pemberdayaan.

Selain itu juga penelitian ini juga menggunakan data kuantitatif. Data kuantitatif adalah data yang dapat diukur dan umumnya berbentuk angka-angka. Dalam penelitian ini data kuantitatif yang diperlukan adalah data jumlah penyandang disabilitas yang mengikuti pemberdayaan.

1.8.5 Sumber Data

Penelitian ini menggunakan sumber data:

1. Sumber data primer

Sumber data primer adalah perolehan secara langsung dari sumber data yang diperlukan (Sugiyono, 2009: 225). Data primer didapatkan peneliti dengan cara diperoleh langsung dari subjek penelitian. Sumber data primer yang diambil dalam penelitian adalah hasil wawancara dari orang yang mengetahui dan terlibat secara langsung dalam proses pemberdayaan yaitu kepala bidang rehabilitasi Dinas Sosial Kota Tangerang Selatan, ketua kelompok penyandang disabilitas, dan penyandang disabilitas yang pernah berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan.

2. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder merupakan pengambilan data yang dilakukan melalui media kedua seperti orang lain maupun melalui dokumen (Sugiyono,

2009: 225). Sumber data sekunder yang digunakan peneliti adalah dokumen, artikel, dan jurnal yang terkait.

1.8.6 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan:

1. Wawancara.

Menurut Moleong dan Gorden, wawancara merupakan metode penggalian informasi dengan melakukan percakapan antara dua belah pihak, sedangkan menurut Stewart & Cash, wawancara adalah suatu pertukaran informasi, motif dan kepercayaan secara interaktif (Herdiansyah, 2011:118).

Dalam hal ini peneliti menggunakan bentuk wawancara terstruktur, yaitu wawancara dilakukan dengan berdasarkan pada pedoman wawancara dengan tujuan mendapat jawaban secara luas dan mendalam sesuai topik masalah yang dirumuskan dan untuk mempersingkat waktu penelitian.

Wawancara pada penelitian ini ditunjukkan kepada Kepala Bidang Rehabilitasi Dinas Sosial Kota Tangerang Selatan Semarang agar mendapat gambaran menyeluruh tentang pelaksanaan pemberdayaan penyandang disabilitas yang dilakukan di Kota Tangerang Selatan, beberapa Ketua Kelompok penyandang disabilitas, dan penyandang disabilitas yang mengetahui dan pernah mengikuti kegiatan pemberdayaan penyandang disabilitas di Kota Tangerang Selatan.

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pencarian dan pengumpulan data melalui hasil karya tulisan ilmiah (Sugiyono, 2009). Dokumentasi jua dapat diartikan penelusuran data selain dari narasumber, tetapi dilakukan dengan penelehaan secara intens terhadap data dan informasi yang penting melalui dokumen yang tersedia untuk menambah kepastian data (Satori & Komariah, 2014). Perolehan data penelitian ini menggunakan pengumpulan data dokumentasi melalui jurnal dan artikel ilmiah agar mendapatkan informasi mengenai profil keadaan penyandang disabilitas.

1.8.7 Teknik Analisis Data dan Interpretasi Data

Analisis data merupakan kegiatan mencari dan menyusun data yang didapat ke dalam kelompok hingga memilih data yang penting yang akan dijadikan fokus kemudian dilakukan penarikan kesimpulan atas data yang dipeleh agar dapat dipahami diri sendiri maupun pembacanya (Satori & Komariah, 2014:201).

Penelitian ini menggunakan teknik analisis berdasarkan Miles dan Huberman, yaitu yang terdiri dari mereduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. (Satori & Komariah, 2014:218-220).

- a. Tahap reduksi data, berarti tahap dimana peneliti melakukan penulisan kembali dari hasil data yang diperoleh ke dalam bentuk teks kemudian memilih hal penting yang terjadi, lalu mengelompokan berdasarkan tema dan kategori tertentu supaya mempermudah peneliti untuk mencari tambahan data jika masih diperlukan.

- b. Tahap penyajian data, tahap menyajikan data dalam bentuk uraian singkat, bagan maupun tabel dengan tujuan memudahkan peneliti untuk memahami peristiwa yang terjadi dan kemudian membuat rencana selanjutnya.
- c. Tahap penarikan kesimpulan, adalah tahap membuat jawaban sementara atas rumusan masalah sehingga dapat menghasilkan temuan baru yang belum jelas sebelumnya.

1.8.8 Kualitas Data

Dalam memeriksa kualitas data agar terbukti valid harus memeriksa setiap kualitas data yang diperoleh memiliki kredibilitas agar mencapai keterpercayaan terhadap hasil data penelitian. Upaya untuk memperoleh kredibilitas dalam penelitian ini dilakukan dengan cara Triangulasi. Triangulasi adalah pengecekan data yang diperoleh melalui berbagai sumber, cara dan waktu agar mendapatkan data yang sesuai dengan kenyataan sesungguhnya (Satori & Komariah, 2014:170).

Pengecekan triangulasi dilakukan dengan melakukan pengecekan terhadap berbagai sumber data yang tersedia dengan menggunakan berbagai cara memperolehnya dan berbagai waktu yang digunakan (Sugiyono, 2009:270).